

## DAFTAR ISI

### Mengelola Perbatasan Negara

1. Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia  
*Iva Rachmawati dan Fauzan* 95-109
2. Rezim Persahabatan ASEAN dalam Tata Kelola Lintas Perbatasan Darat Indonesia-Malaysia Berbasis *Connectivity*  
*Saptopo B Ilkodar* 110-124
3. Penguatan *Human Security* sebagai Strategi Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia  
*Yohanes Sanak* 125-135
4. Keamanan Energi dan Hubungan Kerja Sama Cina-Jepang  
*Uni Wahyuni Sagena, Ravichandran Moorthy* 136-152
5. Signifikansi Desentralisasi Kehutanan Bagi Implementasi REDD+ di Kabupaten Maluku Tengah  
*Emilianus Yakob Sese Tolo* 153-168
6. Menuju Demokrasi Rasional:  
Melacak Pemikiran Jürgen Habermas tentang Ruang Publik  
*Antonius Galih Prasetyo* 169-185

## Penguatan *Human Security* sebagai Strategi Pengelolaan Perbatasan Indonesia-Malaysia

**Yohanes Sanak**

Ketua Pusat Kajian Perbatasan (PUSKATAS) Republik Indonesia - Republika Democratika de Timor Leste  
email: yohanes\_sanak@yahoo.com, pusatkajianperbatasanrirdtl@yahoo.co.id

### **Abstract**

This paper discusses the importance of strengthening human security strategy at the border of Indonesia and Malaysia as a way to realize national interests. Using a case study design and qualitative approach, this paper attempt to explain the conditions of human security in border's area. Some problems such as low level of people welfare indicates that individual security at the border is still unstbale. Underlying this argument, the government should implement the strategy of strengthening human security in border management. Through the strengthening of individual security, people's natonalism will be strong to support the state. This strategy enough feasible to be implemented because Indonesia and Malaysia are neighboring and friendly countries, prominence of individual security issues, the cultural similarities and the failure of the implementation of the strategy of prioritizing state security.

### **Key Words:**

Border of Indonesia and Malaysia, Border management, human security and state security

### **Abstraksi**

*Paper* ini mendiskusikan pentingnya strategi penguatan *human security* di perbatasan Indonesia - Malaysia sebagai cara untuk mewujudkan kepentingan nasional. Dengan menggunakan desain *case study* dan pendekatan kualitatif, tulisan ini berupaya menjelaskan kondisi keamanan manusia di area tersebut. Beberapa permasalahan seperti rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan buramnya potret keamanan individu di perbatasan kedua negara. Mendasari argumen ini, sudah sepatutnya pemerintah menerapkan strategi penguatan *human security* dalam pengelolaan perbatasan kedua negara. Melalui penguatan keamanan individu, semangat nasionalisme warga akan semakin menebal sehingga dukungan rakyat kepada negaranya, semakin besar pula. Strategi ini pun cukup fisibel untuk diterapkan karena kedekatan Indonesia dan Malaysia sebagai negara sahabat dan serumpun, menonjolnya masalah keamanan individu, adanya kemiripan sosial budaya serta gagalnya penerapan strategi pengutamakan *state security*.

### **Kata Kunci:**

Perbatasan Indonesia – Malaysia, Pengelolaan perbatasan, *human security*, dan *state security*

## Pendahuluan

*Paper* ini mendiskusikan urgensi penguatan *human security* sebagai pilihan strategi dalam pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Hal ini menjadi relevan untuk dibahas karena manajemen perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia merupakan suatu keharusan mutlak bagi pemerintah untuk mewujudkan kepentingan nasional di perbatasan sebagai bagian terdepan sebuah negara. Orientasi yang demikian hanya lahir dari pendekatan yang menempatkan manusia dan lingkungannya sebagai bagian terpenting di wilayah perbatasan.

Dalam mengelola perbatasan, ada beberapa pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan tradisional dan non tradisional (Barry Buzan, dkk, 1998: 21–22). Pendekatan tradisional lebih fokus pada upaya membangun keamanan wilayah negara dengan mengandalkan kekuatan senjata. Militer dikerahkan untuk menjaga garis perbatasan agar berbagai ancaman terhadap keutuhan, keamanan dan kedaulatan negara seperti penyelundupan, pelintasan batas secara ilegal dan lain sejenisnya dapat dieliminir.

Sementara pendekatan non tradisional lebih menitikberatkan pada penguatan keamanan individu sebagai modal utama dalam mengelola perbatasan. Upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan akan pangan, perumahan yang layak huni, layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya menjadi target utama. Jadi, komponen yang berperan dalam memelihara keamanan tidak hanya kaum militer, tetapi juga non militer. Masing-masing pendekatan tersebut akan memunculkan strategi politik yang berbeda-beda untuk mewujudkan tujuan negara. Strategi yang digunakan pun tentu beranjak

dari cara pandang negara terhadap perbatasan, apakah perbatasan ditempatkan sebagai bagian terdepan ataukah sebagai bagian terbelakang negara.

Pilihan untuk mengedepankan keamanan territorial (*state security*) dapat dipandang sebagai sebuah cara yang statis dalam mengelola perbatasan. Cara pandang seperti ini menempatkan perbatasan hanya sebagai persoalan geografis, dan mengabaikan aspek sosial ekonomi. Pola yang demikian lebih mengarah pada strategi “bertahan” sebab negara lebih cenderung menunggu dan menangkis “serangan” pihak luar – tidak ada inisiatif untuk menyerang mendahului. Cara ini semata-mata untuk mempertahankan kondisi yang ada dengan tindakan represif – menggunakan kekuatan paksa, bukan dengan pendekatan yang lebih humanis. Diakui memang bahwa di negara-negara yang karena kondisi perbatasan tidak kondusif sehingga diberlakukan *hard border mechanism* dalam mengelola perbatasan, mungkin lebih tepat menggunakan strategi ini yakni pengutamaan *state security*. Kendati demikian, dominasi *state security* perlu diimbangi pula dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat di sepanjang perbatasan.

Pendekatan dan strategi tersebut lebih menguntungkan negara tetapi tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat perbatasan. Bahkan, kehadiran tentara di perbatasan dalam jumlah banyak, tidak jarang memunculkan tindakan-tindakan melawan hukum seperti penganiayaan dan lain sejenisnya. Pengelolaan perbatasan yang lebih berorientasi pada keamanan territorial dan cenderung mengabaikan pembangunan manusia akan menjadi masalah baru. Untuk itu, dibutuhkan sebuah model dan strategi pengelolaan perbatasan yang mampu meminimalisir persoalan keamanan (dalam arti luas) dan dapat memberikan nilai manfaat yang besar bagi kedua negara

terutama bagi masyarakat di sekitar garis perbatasan.

Berangkat dari argument tersebut, muncul beberapa pertanyaan: strategi apakah yang lebih tepat digunakan dalam pengelolaan perbatasan Indonesia–Malaysia? Seberapa pentingkah penguatan *human security* perlu diterapkan di perbatasan? Fisibel-kah strategi *human security* diterapkan di perbatasan kedua negara? Mengacu pada pertanyaan-pertanyaan tersebut maka tulisan ini mencoba menguraikan tentang pentingnya penguatan *human security* sebagai strategi pengelolaan perbatasan kedua negara.

## Metode dan Terminologi

### Metode

Lokus tulisan ini mencakup kawasan perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia tepatnya di pulau Kalimantan. Desain yang digunakan adalah *case study* dengan pendekatan kualitatif, dimana Penulis berupaya untuk mengetahui dan memahami kasus dengan menjaring data dan informasi secara mendalam mengenai strategi yang digunakan dalam mengelola perbatasan antara Indonesia dan Malaysia serta fisibilitas penerapan strategi penguatan *human security* di wilayah tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, maka data-data statistik yang ada hanya digunakan sebagai instrument untuk membantu menjelaskan fenomena di lapangan, tidak dimaksudkan untuk mengkuantifikasikan analisis atau pembahasannya.

Dalam tulisan ini, ada 2 (dua) teknik pengumpulan data yang digunakan yakni 1) wawancara dengan para informan yang dipandang memiliki akses informasi yang cukup, dan 2) studi dokumentasi dan kepustakaan. Studi dokumentasi dan kepustakaan ini meliputi hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah, pemberitaan mass media, serta dokumen-dokumen lainnya.

### Terminologi

Beberapa peristilahan dalam tulisan ini perlu dijelaskan arti dan maknanya guna menghindari terjadinya kesalahan penafsiran. Terminology *human security* yang dipopulerkan oleh UNDP melalui *human development report* (Roland Paris, 2001: 89), mulai menjadi bahan diskusi yang menarik ketika isu-isu kesejahteraan ditempatkan sebagai persoalan krusial sebuah bangsa. Keamanan tidak lagi didefinisikan semata-mata sebagai keamanan negara/territorial (*state security*) melainkan mengalami perluasan makna yaitu meliputi keamanan manusia/individu. Keamanan individu justeru dipandang sebagai bagian terpenting dalam pengelolaan keamanan suatu negara terutama di wilayah perbatasan. Artinya bahwa setiap insan manusia telah ditempatkan sebagai obyek rujukan pengelolaan keamanan suatu negara.

Secara konseptual, *human security*, sebagaimana ditulis oleh Roland Paris meliputi 7 (tujuh) komponen utama yaitu 1) keamanan ekonomi, 2) keamanan pangan, 3) keamanan kesehatan, 4) keamanan lingkungan hidup, 5) keamanan personal (keamanan fisik seperti kekerasan, kecelakaan, dll), 6) keamanan sosial budaya, dan 7) keamanan politik (Roland Paris, 2001: 89). Hampir senada, Jorge Nef mengklasifikasikan *human security* kedalam 5 kelompok yakni 1) keamanan lingkungan hidup, personal dan fisik, 2) keamanan ekonomi, 3) keamanan sosial, 4) keamanan politik, dan 5) keamanan budaya (Jorge Nef, 1997: 25).

Hemat saya, komponen-komponen yang tercakup dalam *human security* dapat dikemas dalam bentuk yang lebih sederhana. Bentuknya berupa kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang mendukung ketiga hal dimaksud. Bila kita mendasarkan pemikiran pada argu-

ment yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa persoalan keamanan teritorial seperti penggeseran pilar batas, penyelundupan, pelintasan batas secara illegal dan lain sejenisnya berakar pada permasalahan kesejahteraan, maka jalan yang paling tepat untuk menyelesaikannya adalah dengan memperkuat keamanan manusia. Beberapa kasus seperti disparitas ekonomi yang cukup tajam antara masyarakat Indonesia dan Malaysia, minimnya dan ketiadaan infrastruktur kemudian memunculkan permasalahan yang lebih besar, yang saya sebut dengan “perselingkuhan” nasionalisme. Mungkin saja istilah ini kurang tepat untuk menggambarkan perasaan sebagian warga Indonesia yang ada di perbatasan.

Istilah “perselingkuhan” nasionalisme, di dalamnya tersirat makna yang mencerminkan lunturnya kecintaan rakyat perbatasan terhadap negaranya. Mereka kurang merasakan arti pentingnya kehadiran pemerintah – justru keberadaan pemerintah Malaysia lebih memberikan manfaat bagi kehidupannya sehari-hari. Masyarakat di perbatasan telah menjadi warga negara Indonesia secara sah (ditunjukkan dengan kepemilikan KTP, akta kelahiran dll) namun faktanya mereka lebih dekat secara psikis dengan Malaysia. Singkatnya, masyarakat kurang merasa memiliki negara, kurang merasakan manfaat kehadiran pemerintah Indonesia sehingga mereka kemudian lebih mencintai Malaysia karena negara tetangga itu lebih mampu memenuhi apa yang mereka butuhkan.

### **Pembahasan**

Mengacu pada uraian latar belakang dan beberapa pertanyaan di atas, maka pembahasan ini meliputi 3 (tiga) bagian yakni 1) menggambarkan permasalahan keamanan individu sebagai potret buram pengelolaan perbatasan kedua negara, 2)

menganalisis pentingnya penguatan *human security* di perbatasan, dan 3) menjelaskan fisibilitas penerapan strategi *human security*.

### **Terganggunya Keamanan Individu sebagai Permasalahan Perbatasan**

Dalam mengelola perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia yang panjangnya mencapai 2004 km, baik di sektor barat maupun sektor timur Kalimantan, muncul permasalahan-permasalahan krusial, baik itu berupa masalah keamanan teritorial maupun keamanan individu. Ada beberapa persoalan penting yang sempat terrekam melalui berbagai media elektronik dan cetak, hasil penelitian dan lain sebagainya. Persoalan itu antara lain adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang cukup mencolok, minimnya infrastruktur di bagian wilayah Indonesia, kerusakan (dan pengrusakan) lingkungan hidup serta terjadinya “perselingkuhan” nasionalisme warga. Uraian singkat permasalahan-permasalahan tersebut pada bagian ini merupakan *entry point* bagi pembahasan penting tidaknya penguatan *human security* di perbatasan.

*Pertama*, kesenjangan ekonomi yang cukup tajam antara warga Indonesia dan warga Malaysia di sekitar tapal batas (Tulus Warsito, 2008: 183). Disparitas ekonomi tersebut antara lain diindikasikan oleh ketergantungan warga Indonesia terhadap Malaysia dalam mencari pekerjaan (Tulus Warsito, 2008: 183), dominasi mata uang ringgit dalam transaksi ekonomi sehari-hari, minimnya infrastruktur ekonomi, kondisi perumahan warga yang tidak layak huni dalam jumlah yang cukup banyak, dan lain sebagainya. Ketersediaan lapangan kerja di Malaysia cukup luas dengan sistim pengupahan yang lebih baik sehingga merangsang warga Indonesia berlomba-lomba mencari pekerjaan di negeri tetangganya. Tulus Warsito dalam

tulisannya, menjelaskan ketimpangan yang cukup tajam antara gaji yang mungkin diperoleh TKI di Malaysia dengan gaji yang mungkin diperoleh di Indonesia. Seorang pekerja Indonesia di Malaysia rata-rata mendapat gaji sebesar US\$ 98-118 per bulan, sementara pekerja Indonesia di dalam negeri rata-rata memperoleh gaji sebesar US\$ 33 per bulan (Tulus Warsito, 2008: 183). Selisihnya mencapai US\$ 70an atau kurang lebih Rp.700.000,-.

Tidak hanya tenaga kerja Indonesia yang resmi, yang illegal pun banyak. Dalam kesehariannya, masyarakat Indonesia di tapal batas lebih mengenal mata uang Malaysia daripada rupiah (Tulus Warsito, 2008: 183). Dominasi ringgit ini menunjukkan betapa lemahnya pemerintah Indonesia membangun perekonomian masyarakat perbatasan, sehingga warga Indonesia harus mencari sesuap nasi di negeri seberang.

*Kedua*, minimnya infrastruktur (Iva Rachmawati, 2008: 72). seperti jalan dan jembatan, informasi dan komunikasi, listrik dan air bersih, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur penting tersebut masih menjadi “barang mahal” bagi masyarakat Indonesia di perbatasan. Untuk kebutuhan informasi dan hiburan misalnya, masyarakat Indonesia lebih mengenal televisi Malaysia daripada televisi-televisi Indonesia. Tidak hanya itu, kondisi sarana transportasi, komunikasi dan utilitas lingkungan pun masih jauh dari yang diharapkan. Sementara kondisi di negara tetangga sudah jauh lebih maju.

*Ketiga*, kerusakan (dan pengrusakan) lingkungan merupakan salah satu masalah penting tetapi bisa jadi sebagai akibat dari persoalan ekonomi dan melemahnya nasionalisme warga. Pengrusakan hutan di Kalimantan disinyalir dilakukan oleh warga Indonesia sendiri. Ini adalah sebuah problema serius yang perlu direspon secara serius pula sebab, persoalan lingkungan dewasa ini menjadi sorotan dunia

internasional. Kayu-kayu hasil perambahan hutan tersebut kemudian dibawa ke Malaysia sehingga Indonesia “dicap” sebagai salah satu negara pengrusak hutan terbesar di dunia, dan pada saat yang bersamaan, Malaysia dikategorikan sebagai salah satu negara pengekspor kayu terbesar di dunia (June Cahyaningtyas, 2008: 207). Artinya bahwa, warga Indonesia “merongrong” negaranya sendiri untuk mendapatkan sesuap nasi tanpa memikirkan label negatif yang akan disematkan oleh dunia kepada Indonesia akibat dari tindakan mereka. Perambahan hutan ini bisa dikategorikan sebagai masalah perbatasan tetapi juga dapat disebut sebagai dampak atau akibat dari masalah kesejahteraan yang tak kunjung membaik. Karena desakan ekonomi, rakyat terpaksa merusak hutannya sendiri untuk menafkahi keluarganya. Bagi rakyat yang sedang lapar, urusan pengrusakan hutan dan urusan nasionalisme bukanlah bagian penting dari kehidupannya – yang terpenting adalah bisa mendapatkan sesuatu untuk mengisi perutnya yang kosong.

*Keempat*, terjadinya “perselingkuhan” nasionalisme warga. Rakyat memang telah “dimeterai” sebagai milik Indonesia tetapi hati dan cintanya untuk Malaysia. Pertanyaan susulan yang muncul adalah apa indikator memudarnya atau bahkan hilangnya kecintaan masyarakat perbatasan terhadap negara? Beberapa *point* yang telah dibahas di atas sudah dapat menunjukkan nasionalisme semu rakyat di perbatasan – mulai dari dominasi ringgit dan televisi Malaysia, maraknya TKI illegal di Malaysia, penyelundupan kayu curian ke Malaysia dan lain sebagainya. Selain itu, isu persoalan pemindahan dan pengrusakan pilar batas (tidak hanya pengrusakan dan penggeseran pilar batas masuk ke wilayah Indonesia tetapi juga penghilangan tanda batas, misalnya yang diberitakan oleh Viva News

edisi 2 Mei 2012) serta perekrutan rakyat Indonesia sebagai tentara sewaan untuk mengawal tapal batas Malaysia (sebut saja pasukan Rela), menjadi indikator lain terjadinya perselingkuhan nasionalisme. Tak dapat disangkal bahwa kasus “perselingkuhan” nasionalisme tersebut terjadi karena terganggunya keamanan insani.

Permasalahan perbatasan kedua negara tidak hanya meliputi empat *point* di atas, melainkan masih banyak masalah lain yang tidak diuraikan pada bagian ini. Misalnya, pelanggaran HAM, masalah rendahnya derajat kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Namun, keempat masalah yang diuraikan tersebut sudah cukup untuk menjelaskan persoalan perbatasan sekaligus menjadi alat teropong untuk melihat orientasi dan kebijakan pengelolaan perbatasan.

### **Pentingnya Penguatan *Human Security* di Perbatasan**

Munculnya masalah “perselingkuhan” nasionalisme sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya merupakan sebuah pukulan telak tetapi hal ini seyogyanya dilihat sebagai referensi bagi pemerintah untuk membenahi diri. Gambaran tentang masalah keamanan individu di wilayah perbatasan sekaligus menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perbatasan (*un-governability*). Karena itu, pemerintah perlu melakukan terobosan-terobosan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai cara menguatkan keberpihakan dan kecintaan rakyat terhadap negaranya.

Persoalan mampu tidaknya pemerintah melayani masyarakat perbatasan sangat bergantung pada daya dobraknya untuk menemukan solusi atas permasalahan krusial yang dihadapi – dalam konteks ini adalah masalah keamanan manusia.

Terjaminnya keamanan individu tersebut membutuhkan diagnosa yang tepat (jenis penyakit dan penyebabnya) sehingga obat yang diberikan pun tepat. Ketika diagnosanya salah, maka kebijakan yang diambil pun tidak akan mengenai sasaran. Permasalahan ekonomi dll – sebagaimana telah disebutkan di atas tidak ditempatkan sebagai prioritas utama yang harus ditangani secara serius karena negara memandang perbatasan sebagai persoalan teritorial semata yang harus ditangani oleh militer. Permasalahan keamanan di perbatasan selama ini lebih cenderung ditangani dengan pendekatan tradisional. Penyelundupan, pelintasan ilegal dan lain sejenisnya dipandang sebagai penyebab masalah keamanan yang dapat dituntaskan dengan kekuatan senjata. Padahal, persoalan-persoalan itu bukan merupakan penyebab melainkan akibat dari keamanan individu yang labil.

Argument yang dibangun sangat sederhana. Bila kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan dan ekonomi) buruk, maka setiap individu akan berupaya memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara – termasuk berusaha merusak sumber daya alam yang ada di sekitarnya, dan melakukan tindakan illegal lainnya. Sebaliknya, jika tingkat kesejahteraan masyarakat cukup mapan, maka akan muncul kesadaran yang tinggi untuk menjaga keutuhan, keamanan dan kedaulatan negara dari pelbagai ancaman. Dengan demikian, tidak hanya militer dan aparat keamanan lainnya yang menjadi pihak paling bertanggungjawab atas keamanan perbatasan melainkan masyarakat pun akan dengan sadar ikut terlibat dalam upaya memelihara keamanan negara. Dalam ulasan Barry Buzan dkk misalnya, negara harus melindungi rakyatnya dari ancaman dan gangguan keamanan yang dihadapi hampir setiap saat seperti ancaman kelaparan, ancaman

mewabahnya penyakit berbahaya, dan lain sebagainya. Dengan cara yang demikian, rakyat akan merasa memiliki negara. Masyarakat lebih membutuhkan tenaga medis, paramedis dan guru daripada tentara dan polisi pengawal perbatasan. Masyarakat lebih mendambakan sarana prasarana ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang memadai daripada pos TNI pengamanan perbatasan. Kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat tersebutlah yang harus dipenuhi sebagai cara meyakinkan masyarakat bahwa negara benar-benar hadir untuk melayani mereka.

Pandangan ini merupakan alasan mengapa penguatan *human security* sangat dibutuhkan sebagai strategi pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. *Human security* menjanjikan prospek yang lebih baik dan lebih bermartabat. Sebab, kepentingan nasional yang paling utama di perbatasan adalah menampilkan wajah perbatasan yang menarik dari berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kepentingan nasional dimaksud dapat terwujud, bila negara mampu mengelola perbatasan dengan menggunakan cara yang tepat yakni dengan melayani dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat. Strategi ini dapat diterjemahkan sebagai strategi “menyerang” sebab, negara tidak bertahan dengan kondisi yang ada melainkan berupaya melakukan perubahan-perubahan dengan cara-cara yang lebih humanis.

Melalui penguatan kesejahteraan yang kemudian berdampak pada peningkatan kesadaran rakyat (untuk menggunakan hak dan kewajibannya secara proporsional), maka ancaman yang berasal dari dalam akan semakin berkurang dengan sendirinya. Ancaman akan keamanan perbatasan yang bersumber dari dalam justeru sangat berbahaya dan sulit dituntaskan. Negara akan berhadap-

hadapan dengan rakyatnya sendiri, dan terjadi gesekan yang cukup kuat. Gesekan itu hanya dapat ditekan melalui penyempitan jarak antara rakyat dengan negara. Untuk itu, negara harus mampu menempatkan diri sebagai bagian integral dari rakyat dengan memberikan pelayanan sesuai prioritas kebutuhan rakyat.

Atensi yang kuat dari pemerintah untuk mengutamakan keamanan manusia akan semakin meningkatkan kualitas hubungan antara rakyat dengan negara. Kadar cinta yang semakin tebal diantara keduanya menjadi kunci utama menghilangkan “perselingkuhan” nasionalisme rakyat perbatasan. Selain itu, dengan kualitas SDM yang membaik, dapat terjalin hubungan yang harmonis, dapat pula terbangun kerjasama yang baik antara warga Indonesia dengan warga Malaysia di perbatasan dalam berbagai bidang. Bahkan, hal ini menjadi salah satu cara untuk memperkecil potensi konflik antar warga kedua negara di perbatasan.

### **Fisibilitas Penerapan Strategi *Human Security***

Pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang masih didominasi oleh strategi pe-nomor satu-an *state security* rupanya tidak mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Upaya melindungi negara dari ancaman luar dengan pengetatan penjagaan garis batas oleh tentara ternyata tidak dapat menjamin sepenuhnya keutuhan dan keamanan negara. Lepasnya sipadan dan ligitan adalah salah satu bukti lemahnya negara dalam konteks ini. Indonesia yang mengandalkan “otot” (pasukan bersenjata), justeru kalah bertarung dengan negara tetangganya yang mengandalkan “otak” (diplomasi dan pembangunan wilayah). Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa kehadiran tentara untuk mengawal keamanan negara dari ancaman

pihak luar terbukti gagal karena gangguan dan ancaman keamanan justru berasal dari dalam negara sendiri. Karena itu negara perlu segera mengubah strategi mengelola perbatasan yakni dengan mengedepankan *human security*, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, fisibel-kah penerapan strategi ini di wilayah perbatasan kedua negara? Ada beberapa argument yang dibangun untuk menjelaskan layak tidaknya mengimplementasikan strategi *human security* yakni 1) Indonesia dan Malaysia merupakan negara sahabat dan serumpun, 2) mencoloknya persoalan keamanan individu – bukan keamanan teritorial, 3) kemiripan kultural dan hubungan sosial yang masih kuat diantara kedua belah pihak, serta 4) gagalnya strategi penguatan *state security* dalam mewujudkan kepentingan nasional.

*Pertama*, Indonesia dan Malaysia merupakan negara sahabat dan negara serumpun yang telah lama menjalin hubungan secara harmonis. Dengan demikian, mestinya pengelolaan perbatasan kedua negara tidak kaku melainkan bersifat terbuka. Seharusnya, dua negara sahabat, apalagi serumpun (memiliki kesamaan kultural), lebih cenderung memikirkan kesejahteraan bersama, bukan menunjukkan sikap khawatir terhadap potensi konflik dan ancaman negara tetangga dengan menempatkan pasukan bersenjata yang selalu siap perang setiap saat. Penempatan pasukan penjaga perbatasan dalam jumlah banyak mengindikasikan kekurangan percaya-an negara yang satu terhadap yang lainnya (negara tetangga). Idealnya, perbatasan kedua negara perlu ditata dengan pendekatan kesejahteraan, bukan dengan pendekatan keamanan (militer).

*Kedua*, telah disinggung di bagian awal tulisan ini bahwa, permasalahan pokok yang dihadapi di perbatasan darat Indone-

sia – Malaysia adalah masalah sosial ekonomi. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa masalah keamanan teritorial pun cukup banyak. Sebut saja pelintasan batas secara illegal, penyelundupan dan potensi konflik tapal batas yang cukup tinggi. Hingga saat ini, masih terdapat 10 (sepuluh) titik batas bermasalah baik di sektor barat maupun timur (Laporan Ditjend Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri, Penanganan Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia, 2012), yakni Pulau Sebatik, Sungai Sinabed, Sungai Simantipal, Daerah Prioritas II dari titik B2700 s/d titik B3100, Daerah Prioritas II dari titik C500 s/d C600, Tanjung Datu, Batu Aum, Gunung Jagoi, Gunung Raya dan Daerah Prioritas III titik D400. Persoalan lainnya seperti penyelundupan, perambahan hutan dan pelintasan batas secara illegal ditengarai sebagai masalah turunan dari masalah kesejahteraan yang rendah. Karenanya, jalan keluar atas permasalahan-permasalahan tersebut yang perlu dilakukan adalah negara memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat seperti dokter, paramedis, guru, ketersediaan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, pasar, modal usaha dan lain sebagainya – bukan dengan menghadirkan tentara yang lengkap dengan senjata modern. Tak dapat disangkal bahwa militer perlu mengawal tapal batas, tapi bukan satu-satunya. Sebab, keikutsertaan masyarakat dan komponen non militer lainnya dalam mengelola perbatasan, sangat penting.

*Ketiga*, alasan lain yang patut dipertimbangkan adalah bahwa antara masyarakat Indonesia dan Malaysia yang ada di kawasan perbatasan, memiliki banyak kemiripan bahkan kesamaan sosial budaya. Dalam konteks ini, perbatasan hanyalah sebuah garis semu yang menunjukkan batas kedaulatan negara – batas geografis, tetapi tidak menjadi

pembatas sosial budaya kedua pihak. Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan cultural seperti bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya. Dengan demikian, manajemen perbatasan seyogyanya lebih difokuskan pada penguatan hubungan sosial budaya dan ekonomi kedua pihak sehingga masyarakatlah yang didorong untuk menjadi salah satu komponen utama penjaga keamanan perbatasan kedua negara. Cara ini mungkin akan lebih efektif dan lebih efisien untuk mengawal perbatasan dari gangguan dan ancaman terhadap keamanan negara.

*Keempat*, gagalnya strategi penguatan *state security* dalam mewujudkan kepentingan nasional di perbatasan. Kendati pemerintah mengaku tidak menganut *hard border regime*, namun faktanya pengerahan kekuatan militer untuk menjaga perbatasan masih saja menjadi prioritas utama. Artinya bahwa ada indikasi mengarah pada penerapan *hard border regime* (Ganewati Wuryandari, dkk, 2009: 150). Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan tentara dan aparat keamanan lainnya cukup besar dan hal ini tentu mengurangi porsi untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Salah satu contoh, untuk mengawal perbatasan kedua negara, pemerintah membeli helikopter tempur senilai 96 milyar rupiah (Republika Online, 27 Maret 2012). Bila uang ini dimanfaatkan untuk membangun sekolah, maka akan terbangun 96 unit sekolah – bila kita asumsikan setiap unit sekolah baru membutuhkan dana 1 milyar rupiah. Ataukah dana dimaksud dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, sarana prasarana ekonomi, dan lain sebagainya, yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Contoh lainnya, kelembagaan pengelolaan perbatasan kedua negara masih didominasi oleh militer. GBC (General Border Commit-

tee) misalnya, dipimpin oleh Menteri Pertahanan, atau HLC (High Level Committee) (Laporan Ditjend Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri, Penanganan Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia, 2012), yang dipimpin oleh Panglima TNI. Ini hanyalah beberapa contoh kecil, mungkin masih ada data lain serupa yang menunjukkan betapa kuatnya keberpihakan pemerintah kepada aparat keamanan, dan belum menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama pembangunan perbatasan.

Pada tataran kebijakan makro, mungkin pemerintah telah berupaya melaksanakan strategi penguatan keamanan individu. Salah satu indikatornya adalah telah terbentuknya kelembagaan-kelembagaan yang berfungsi untuk menangani urusan kesejahteraan masyarakat seperti SOSEK-MALINDO (Sosial Ekonomi Malaysia - Indonesia), yang dalam hal ini dikomandoi oleh Dirjend PUM Kemendagri. Meski demikian kinerja lembaga ini belum menunjukkan hasil yang cukup berarti. Secara structural, SOSEK MALINDO berada dibawah GBC dan HLC (Laporan Ditjend Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri, Penanganan Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia, 2012). Kinerja SOSEK MALINDO yang belum mampu memperbaiki taraf hidup rakyat perbatasan, mungkin disebabkan oleh keterbatasan alokasi dana – karena dananya lebih banyak dikucurkan untuk urusan keamanan teritorial.

Gagalnya strategi pengutamaan *state security* sudah dibuktikan dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas. Kasus sipadan dan ligitan, “perselingkuhan” nasionalisme dan lain sebagainya, seyogyanya menjadi bahan refleksi untuk mengubah cara dan pola mengurangi potensi ancaman dan gangguan terhadap negara.

Melalui pembangunan *human security*, tidak hanya negara Indonesia yang diuntungkan dengan menebalnya nasionalisme rakyat di perbatasan melainkan negara tetangga pula. Dengan kesadaran yang tinggi, rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia akan mendorong dan terus memupuk jalinan hubungan yang harmonis, membangun kerjasama dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan serta membantu memperlancar urusan negara masing-masing di perbatasan.

### Kesimpulan

Pengelolaan perbatasan Indonesia – Malaysia yang masih berorientasi pada keamanan territorial mengindikasikan bahwa negara memandang keamanan perbatasan sebagai sebuah ancaman dari luar sehingga perlu diterapkan strategi penguatan *state security*, dimana peran militer diperkuat untuk mengawal tapal batas. Hanya militer yang diyakini dapat menyelesaikan permasalahan di perbatasan. Padahal, persoalan penting yang sangat membutuhkan penanganan sesegera mungkin adalah masalah keamanan manusia seperti kebutuhan akan kecukupan pangan, bebas dari ancaman penyakit, kebodohan dan pelanggaran HAM, dan lain sebagainya.

Untuk itu, negara seyogyanya memikirkan kembali strategi penguatan *state security*. Sebab, strategi tersebut tidak banyak memberikan manfaat, bahkan gagal meminimalisir persoalan keamanan. Ancaman keamanan yang paling berbahaya adalah ancaman dari dalam negeri, namun negara lebih fokus menangani ancaman dari luar sehingga penyebab ancaman internal tidak menjadi prioritas penanganan.

Untuk itu, negara perlu memperkuat keamanan individu sebagai cara untuk mempertebal rasa identitas bangsa dan

semangat nasionalisme yang akan berdampak pada kesadaran rakyat untuk menjaga keutuhan, keamanan dan kedaulatan negaranya. Melalui strategi penguatan *human security*, tidak hanya negara yang diuntungkan tetapi juga negara tetangga karena kesadaran rakyat yang tinggi akan mendorong jalinan hubungan yang harmonis dan kerjasama dalam berbagai bidang.

### Daftar Pustaka

- Buzan, Barry, Ole Waever dan Jaap de Wilde. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Cahyaningtyas, June. (2008). *Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia Melalui Trans-boundary Biodiversity Conservation Area (TBCA): Peluang dan Tantangan*. Proceeding Workshop tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI. UPN Veteran Yogyakarta. halmn. 207.
- Laporan Ditjend. Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri. (2012). *Penanganan Pengelolaan Perbatasan Antar Negara Republik Indonesia*.
- Nef, Jorge. (1997). *Human Security and Mutual Vulnerability*. Ottawa, Canada: International Development Research Centre.
- Paris, Roland. (2001). *Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? International Security*. Vol.26. No.2. The President and Fellows of Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology.
- Rachmawati, Iva. (2008). *Diplomasi Perbatasan Dalam Rangka Mempertahankan Kedaulatan NKRI*. Proceeding Workshop tentang Pengelolaan Wilayah

- Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI. UPN Veteran Yogyakarta. halmn. 72.
- Republika Online. (27 Maret 2012). *Wow, Perbatasan Indonesia – Malaysia Akan Dikawal Heli Tempur Seharga 96 Milyard Rupiah*. (Online). (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/27/m1j113-wow-perbatasan-rimalaysia-akan-dikawal-heli-tempur-seharga-rp-96-miliar>, diakses pada 10 Oktober 2012).
- Viva News. (2 Mei 2012). *11 Patok Perbatasan RI-Malaysia Lenyap – Patok-Patok Yang Hilang Berada Di Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK)*. (Online). (<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/309972-11-patok-perbatasan-ri-malaysia-lenyap>, diakses pada 10 Oktober 2012).
- Warsito, Tulus. (2008). *Perbatasan Kalimantan Barat – Serawak Dalam Perspektif Buruh Migran Indonesia*. Proceeding Workshop tentang Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI. UPN Veteran Yogyakarta. halaman. 183.
- Wuryandari, Ganewati. (2009). *Keamanan di Perbatasan Indonesia-Timor Leste: Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.